

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PERTAHANAN NEGARA-NEGARA AFRIKA STUDI KASUS KERJASAMA MILITER TAHUN 2022 – 2024

Ferri Prayogi Ginting¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

International cooperation in enhancing the defense capacity of African countries through military collaboration plays a crucial role in strengthening regional stability and security. This collaboration involves various actors, including developed countries, international organizations, and regional defense alliances, aiming to improve military capabilities, modernize defense equipment, and facilitate training and technology transfer. Case studies indicate that African nations significantly benefit from such cooperation, including increased professionalism in their armed forces, enhanced joint operational capabilities, and access to advanced technology and resources. However, challenges such as dependency on donor countries, potential foreign intervention, and difficulties in harmonizing defense policies remain obstacles that need to be addressed. Overall, international cooperation in the defense sector contributes to the enhancement of African military capacity. However, to ensure sustainable benefits, a national strategy that emphasizes independence and sovereignty must be developed to protect each country's national interests

Keywords: Africa, International Cooperation, Defense Capacity, Military Cooperation, & Defense Policy.

ABSTRAK

Kerjasama internasional dalam peningkatan kapasitas pertahanan negara-negara Afrika melalui kerjasama militer memiliki peran penting dalam memperkuat stabilitas dan keamanan regional. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, termasuk negara-negara maju, organisasi internasional, dan aliansi pertahanan regional, dengan tujuan meningkatkan kapabilitas militer, modernisasi alutsista, serta pelatihan dan transfer teknologi. Studi kasus menunjukkan bahwa negara-negara Afrika memperoleh manfaat signifikan dari kerjasama ini, termasuk peningkatan profesionalisme angkatan bersenjata, kemampuan operasi bersama, serta akses terhadap teknologi dan sumber daya yang lebih canggih. Namun, tantangan seperti ketergantungan terhadap negara donor, potensi intervensi asing, serta kesulitan dalam harmonisasi kebijakan pertahanan tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, kerjasama internasional dalam sektor pertahanan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas militer negara-negara Afrika. Namun, agar manfaatnya berkelanjutan, diperlukan strategi nasional yang mandiri guna menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional masing-masing negara.

Kata Kunci: Afrika, Kerjasama Internasional, Kapasitas Pertahanan, Kerjasama Militer, dan Kebijakan Pertahanan.

PENDAHULUAN

Kerja sama internasional memegang peran penting dalam hubungan antarnegara, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Di Afrika, tantangan yang dihadapi tidak sederhana, mulai dari konflik bersenjata, aksi teror, kudeta militer, hingga krisis kemanusiaan. Situasi ini membuat banyak wilayah yang sudah rapuh semakin tertekan, membuka peluang bagi campur tangan asing lewat kekuatan proksi, perebutan sumber daya, hingga manipulasi informasi.

Tahun 2024 menjadi potret nyata betapa kompleksnya masalah keamanan di benua ini. Di wilayah Sahel, Afrika Barat, dan Tanduk Afrika, kelompok militan seperti *Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimin* (JNIM) dan *Islamic State in the Greater Sahara* (ISGS) terus melancarkan serangan mematikan, menewaskan ribuan orang. Somalia pun masih berjuang menghadapi ancaman Al-Shabaab (Pusat Studi Strategis Afrika, 2024). Tren kudeta militer di negara-negara seperti Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, dan Guinea makin memperburuk keadaan, menghambat proses demokratisasi, sekaligus memperparah krisis ekonomi dan keamanan. Kondisi ini memicu eksodus besar-besaran, hingga jumlah pengungsi di Afrika mencapai 35 juta jiwa, tiga kali lipat dibanding 15 tahun lalu (Tempo, 2024).

Masalah lainnya, kapasitas pertahanan nasional di banyak negara Afrika masih terbatas, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun pendanaan. Keterbatasan ini membuat upaya membangun perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan jadi terhambat. Karena itu, kerja sama internasional menjadi salah satu opsi strategis, mulai dari aliansi militer, pelatihan, transfer teknologi, hingga koordinasi bantuan kemanusiaan. Meski begitu, ketergantungan pada bantuan asing juga berisiko melemahkan kedaulatan negara (Al-Fadhat & Effendi, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis melihat peningkatan kapasitas pertahanan Afrika memang bisa dicapai lewat kerja sama internasional, asalkan perbedaan kepentingan antarnegara dapat dikelola dengan baik. Inilah yang mendorong penelitian mengenai kerja sama militer dalam peningkatan pertahanan negara-negara Afrika pada periode 2022–2024.

KERANGKA ANALITIK

Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme menempatkan ide dan norma sebagai elemen penting dalam kehidupan sosial global, termasuk isu lingkungan dan hak asasi manusia. Teori ini melihat

bahwa politik dunia tidak lagi hanya digerakkan oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, LSM, atau kelompok masyarakat yang punya pengaruh dalam urusan lintas negara.

Konstruktivisme tidak sekadar menjelaskan fenomena, tapi berusaha memahaminya dari sudut pandang sosial. Ia menekankan pentingnya norma, identitas, dan ide dalam membentuk perilaku aktor internasional. Dalam pandangan ini, realitas politik bukan sesuatu yang sudah ada sejak awal, melainkan hasil konstruksi sejarah, budaya, dan interaksi sosial. Fakta-fakta sosial seperti kedaulatan atau hak asasi manusia dianggap nyata karena diakui dan dijalankan bersama, meski tidak memiliki bentuk material.

Perhatian utama konstruktivisme ada pada hubungan timbal balik antara agen (aktor seperti negara atau organisasi) dan struktur (norma, aturan, dan ide). Agen membentuk struktur lewat tindakan dan interpretasinya, sementara struktur juga membentuk identitas dan kepentingan agen. Pengetahuan, simbol, dan nilai menjadi kunci dalam proses ini, karena dari sanalah realitas sosial dimaknai dan dikategorikan. Kekuasaan dalam konstruktivisme tidak semata kemampuan memaksa, tapi juga kapasitas membentuk pandangan, identitas, dan kepentingan pihak lain. Struktur normatif berperan besar dalam menentukan cara aktor berinteraksi dan bekerja sama, termasuk dalam merumuskan kebijakan bersama.

Hak asasi manusia adalah salah satu contoh nyata konstruksi norma global, yang diakui secara luas pasca Perang Dingin. Dari konsep ini lahir gagasan *human security*, yang menekankan kebebasan individu dari ancaman fisik maupun psikologis, serta penolakan terhadap praktik seperti perdagangan manusia. Kesadaran ini mendorong munculnya organisasi internasional dan kebijakan nasional yang fokus pada perlindungan hak-hak tersebut. Secara keseluruhan, konstruktivisme membantu memahami bahwa politik internasional dibentuk oleh interaksi ide, norma, dan identitas. Perubahan dalam norma dapat mengubah cara aktor bertindak, membentuk kepentingan baru, dan bahkan menggeser tatanan politik global (Baylis, Smith, & Owens, 2011).

Teori Hubungan Internasional

Hubungan internasional pada dasarnya adalah interaksi yang dibangun antara satu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan nasional masing-masing. Negara menjadi aktor utama, meski tidak bisa mengabaikan peran aktor non-negara seperti organisasi internasional, LSM, atau perusahaan multinasional, selama mereka memiliki pengaruh terhadap kehidupan negara dan bangsa. Hubungan ini muncul karena setiap negara memiliki

keterbatasan dan saling membutuhkan satu sama lain.

Sejak 1980-an, kajian hubungan internasional semakin luas, tidak hanya membahas negara sebagai pelaku, tetapi juga melibatkan aktor non-negara yang berperan di panggung global. Menurut Perwita & Y.M. Yani, hubungan internasional merupakan bentuk interaksi yang tak terhindarkan akibat saling ketergantungan dan kompleksitas kehidupan dunia (Perwita & Yani, 2005). Andrias menambahkan bahwa bidang ini bersifat interdisipliner, meminjam konsep dari berbagai cabang ilmu sosial, dan pada awalnya berkembang untuk mencegah perang serta membangun perdamaian. Sejarah kelahirannya dipicu oleh dua faktor utama: perhatian besar terhadap dinamika dunia pasca-Perang Dunia I, dan kesadaran akan perlunya mencegah peperangan setelah melihat besarnya korban jiwa dan kerusakan materiil. Dalam perkembangannya, hubungan internasional mencakup isu politik, hukum, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, hingga lingkungan, yang melampaui batas negara (Andrias, 2015).

Dalam konteks penelitian ini, kerja sama militer antara TNI AD dan US Army menjadi contoh nyata hubungan internasional di bidang pertahanan. Kedua negara memiliki ketergantungan tertentu dan tujuan strategis masing-masing, khususnya dalam memperkuat keamanan nasional.

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan utama yang ingin dicapai negara dalam hubungan internasional, lahir dari kebutuhan vital seperti keamanan, pertahanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Ia menjadi dasar perumusan kebijakan luar negeri dan mencerminkan kekuatan negara, baik yang bersifat nyata seperti jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya, kapasitas industri dan militer, maupun yang bersifat nonfisik seperti kepemimpinan, efisiensi birokrasi, diplomasi, dan kohesi sosial. Kepentingan nasional terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari kepentingan primer yang bersifat mutlak, kepentingan sekunder sebagai penunjang, hingga kepentingan permanen, variabel, umum, dan khusus yang disesuaikan dengan situasi. Dalam praktiknya, setiap negara berperan sebagai aktor utama yang merdeka dan berdaulat, berupaya memaksimalkan kepentingannya, dan menerjemahkannya ke dalam kekuatan untuk mempertahankan serta memperluas pengaruhnya di kancah global (Sitepu, 2011).

Kerjasama Internasional

Teori hubungan internasional menempatkan kerjasama sebagai upaya penyesuaian

perilaku antaraktor untuk mencapai tujuan bersama tanpa paksaan, biasanya melalui organisasi atau rezim internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Kerjasama lahir dari kepentingan bersama maupun pribadi, dan bergantung pada tingkat saling percaya bahwa pihak lain juga akan bekerja sama. Negara biasanya terlibat dalam kerjasama demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, efisiensi, keamanan bersama, serta mengurangi dampak negatif dari tindakan unilateral.

Dalam sistem internasional yang anarkis, kerjasama membutuhkan interaksi berkelanjutan, komunikasi intensif, dan keberadaan institusi meski belum sempurna. Bentuk kerjasama bisa bilateral, namun fokus utamanya adalah multilateralisme, hubungan antara tiga atau lebih negara yang diatur prinsip perilaku umum melalui organisasi atau rezim internasional. Faktor pendorongnya meliputi kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, perubahan sifat peperangan, dan dorongan bernegosiasi. Saat ini, negara bukan lagi aktor tunggal dalam politik internasional, karena kepentingan dan arah kerjasama juga dibentuk oleh institusi internasional yang mampu mengelola, bahkan memaksakan, agenda mereka (L., 1997).

Konsep Diplomasi Pertahanan

Diplomasi adalah instrumen utama dalam menjalankan kepentingan nasional, khususnya dalam hubungan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi, negara dapat membangun citra, menjalin hubungan bilateral, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Proses ini dijalankan oleh perwakilan resmi yang ditunjuk negara tanpa campur tangan pihak lain, mencakup perundingan hingga kerja sama internasional di berbagai bidang. Seiring meningkatnya ketergantungan antarnegara, frekuensi pertemuan dan konferensi internasional pun bertambah (Sitepu, 2011).

Pasca Perang Dingin, konsep diplomasi pertahanan mulai menonjol, di mana instrumen militer digunakan untuk mendukung kebijakan luar negeri, terutama dalam menjaga keamanan regional dan global. Diplomasi pertahanan mencakup kerja sama keamanan dan militer lintas negara yang menghasilkan penguatan kelembagaan, dialog strategis, pertukaran informasi, peningkatan rasa saling percaya, reformasi militer, hingga latihan bersama, semuanya demi tercapainya stabilitas dan perdamaian jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan realitas yang kompleks dan alami, dengan

peneliti sebagai instrumen utama. Metode ini dipilih untuk mengkaji kerja sama internasional dalam peningkatan kapasitas pertahanan negara-negara Afrika melalui studi kasus kerja sama militer 2022–2024, khususnya hubungan Indonesia–Singapura. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, bertujuan mengidentifikasi, mengukur, dan menjelaskan hubungan antarvariabel secara rinci. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mengacu pada literatur ilmiah terkait fenomena, serta *internet based research*, yaitu pengumpulan informasi daring seperti berita dan dokumen resmi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber untuk memvalidasi informasi dari berbagai perspektif, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan tidak bias pada satu sudut pandang.

PEMBAHASAN

Kebijakan Luar Negeri Afrika

Kebijakan luar negeri negara-negara Afrika merupakan strategi dan tindakan untuk mengatur hubungan dengan aktor internasional, baik negara, organisasi, maupun pihak non-negara, yang berlandaskan kepentingan nasional di bidang politik, ekonomi, keamanan, serta sosial budaya. Secara politik, banyak negara Afrika mengusung prinsip non-blok, aktif dalam kerja sama melalui Uni Afrika (AU) dan PBB, namun menghadapi tantangan seperti tekanan diplomatik dari negara besar dan ketimpangan kekuatan antarnegara di benua tersebut. Dari sisi ekonomi, Afrika masih bergantung pada ekspor sumber daya alam, investasi asing, dan perdagangan internasional, terutama dengan mitra utama seperti Tiongkok, namun rentan terhadap inflasi, utang luar negeri, dan korupsi (ADF, 2024).

Dalam aspek keamanan, negara-negara Afrika bekerja sama dengan kekuatan global untuk melawan terorisme dan mengirim misi perdamaian, meski konflik internal, lemahnya koordinasi regional, dan campur tangan asing menjadi hambatan besar. Sementara di bidang sosial budaya, diplomasi budaya semakin berkembang, isu migrasi ke Eropa menjadi perhatian, dan tekanan internasional terkait hak asasi manusia tetap tinggi. Secara umum, arah kebijakan luar negeri Afrika dipengaruhi sejarah kolonialisme,

Pan-Afrikanisme, pembangunan ekonomi, keamanan, dan hubungan dengan kekuatan besar dunia. Meski dihadapkan pada ketergantungan ekonomi dan instabilitas politik, negara-negara Afrika berupaya memperkuat kerja sama regional dan mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Penelitian seperti yang dijelaskan Quinn (2019)

menunjukkan bahwa kebijakan ini sering berpusat pada isu dekolonisasi, pembangunan negara, otonomi ekonomi-politik, dan hubungan dengan kekuatan besar, dengan peran presiden yang dominan serta kecenderungan responsif terhadap dinamika geopolitik global dan regional (Quinn, 2019).

Kapasitas Pertahanan Negara Afrika

Industri pertahanan Afrika Selatan adalah salah satu yang terbesar di negara berkembang, tumbuh pesat sejak era apartheid akibat embargo senjata PBB, ancaman eksternal, dan kebijakan politik yang mendorong kemandirian militer. Awalnya bergantung pada impor, negara ini membangun kapasitas produksi sendiri melalui lembaga seperti Armscor, yang mengoordinasikan penelitian, pengembangan, dan produksi senjata. Pada puncaknya di akhir 1980-an, Afrika Selatan hampir swasembada dalam memenuhi kebutuhan militernya, meski menghadapi tantangan biaya tinggi dan pasar domestik yang menyusut, sehingga mendorong strategi ekspor.

Memasuki era pasca-apartheid, ancaman eksternal menurun tajam, memicu perdebatan soal perlunya mempertahankan industri pertahanan. Tokoh seperti Ronnie Kasrils dan Joe Modise menekankan alasan strategis, politik, psikologis, kebanggaan nasional, dan ekonomi sebagai dasar mempertahankan industri ini, meski biayanya besar (Modise, 1996). Namun, perubahan lingkungan strategis dan proses demokratisasi mendorong pemotongan besar-besaran anggaran pertahanan, lebih dari 50% antara 1989 dan 1998, serta penurunan drastis belanja pengadaan, menandai fase baru bagi industri pertahanan Afrika Selatan yang harus beradaptasi dengan kebutuhan dan realitas politik yang berubah (Batchelor & Willet, 1998).

Kerjasama Pertahanan Negara Afrika

Kerjasama pertahanan di Afrika banyak dijalankan melalui program keamanan, latihan militer, dan operasi bersama, dengan Komando Afrika AS (AFRICOM) sebagai aktor utama. Berbasis di Stuttgart, Jerman, AFRICOM bertugas memperkuat keamanan, stabilitas, dan kemakmuran regional dengan pendekatan “3D”: diplomasi, pembangunan, dan pertahanan. Mereka membantu negara-negara Afrika membangun kapasitas militer untuk menghadapi ancaman ekstremis, menanggapi krisis, dan menjaga keselamatan rakyat, sehingga tercipta kondisi yang mendukung pendidikan, lapangan kerja, dan layanan kesehatan.

Dukungan ini mencakup pelatihan, penjualan peralatan, hingga pembinaan

hubungan militer-sipil yang menghormati hukum perang dan HAM. AFRICOM mengawasi seluruh operasi, latihan, dan kerja sama keamanan Departemen Pertahanan AS di 53 negara Afrika, termasuk koordinasi dengan organisasi regional seperti Uni Afrika dan ECOWAS. Dengan sekitar 2.000 personel, AFRICOM bekerja sama dengan berbagai komponen, Angkatan Darat, Laut, Udara, Marinir, hingga Pasukan Operasi Khusus yang masing-masing fokus pada peningkatan kapasitas keamanan darat, laut, udara, dan penanggulangan ekstremisme di berbagai wilayah Afrika.

Pembahasan

Selama dua dekade terakhir, negara-negara di Afrika Barat dan Tengah membentuk banyak organisasi regional dengan mandat yang semakin luas, terutama di bidang perdamaian dan keamanan (Willem, 2023). Sejarah kelembagaan di kawasan ini diwarnai tumpang tindih keanggotaan dan persaingan antarorganisasi, meski ada upaya rasionalisasi melalui Rencana Aksi Lagos, Perjanjian Abuja, hingga pembentukan Uni Afrika (AU) dan Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Afrika (APSA).

Beberapa kategori organisasi yang berperan meliputi komunitas ekonomi regional seperti ECOWAS dan ECCAS, organisasi subregional seperti G5 Sahel, inisiatif AU seperti Proses Nouakchott, hingga pengaturan keamanan yang tidak diakui AU seperti Komisi Teluk Guinea. Kasus Mali 2012 menunjukkan lemahnya koordinasi dan kapasitas respon cepat AU dan ECOWAS, yang kemudian mendorong pembentukan Pasukan Gabungan G5 Sahel. Meski ada kerja sama formal antarorganisasi, hambatan seperti kurangnya koordinasi, tumpang tindih mandat, dan pengaruh agenda donor eksternal membuat efektivitas pertahanan kolektif masih terbatas. Kondisi ini menuntut mekanisme koordinasi yang jelas agar peran organisasi-organisasi tersebut lebih terarah dan efisien dalam menjaga keamanan kawasan.

KESIMPULAN

Kerja sama internasional di bidang pertahanan memainkan peran penting dalam memperkuat stabilitas, keamanan, dan kedaulatan negara-negara Afrika. Melalui kolaborasi dengan negara maju, organisasi internasional, dan aliansi regional, dukungan diberikan dalam bentuk pelatihan militer, transfer teknologi, pengadaan alutsista, hingga latihan bersama.

Program pelatihan meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata Afrika dalam menghadapi ancaman modern, sementara modernisasi persenjataan membantu memperkuat

kemampuan tempur meski masih bergantung pada impor dan bantuan luar negeri. Namun, ketergantungan ini memunculkan risiko tekanan politik dan campur tangan asing, di samping tantangan harmonisasi kebijakan pertahanan di tingkat regional akibat perbedaan kepentingan antarnegara. Untuk memastikan manfaat jangka panjang, Afrika perlu mengembangkan industri pertahanan domestik, memperkuat kemandirian militer, dan mengoptimalkan kerja sama regional agar keamanan dapat tercapai tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrias, D. (2015). *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2011). *The Globalization of World Politics: An introduction to International Relations*. oxford: Oxford University Press.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- L., D. &. (1997). *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher.
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan. Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Quinn, J. J. (2019). *african foreign policy*.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.117>
- Sitepu, A. P. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

- Al-Fadhat, & Effendi. (2019). Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: KetahananMaritim Dan Transfer Teknologi Dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 3.
- Batchelor, P., & Willet, S. (1998). Disarmament and Industrial Adjustment in South Africa; Signe Landgren, Embargo Disimplemented: South Africa's Military Industry. *SIPRI*.
- Modise. (1996). *Highlights Benefits of SA Defence Industry*. Business Day.
- PSSA (2024). *Pusat Studi Strategis Afrika*. African's Strategist Studies.
- Willem, I. &. (2023). *Keamanan Afrika Selatan Bergantung pada Penerapan Strategi Pemberantasan Kejahatan Terorganisi*. issafrica.org.

INTERNET

- ADF. (2024). *Kontinental Kolaborasi, Negara-Negara Membentuk Aliansi Baru untuk*

Mengatasi Tantangan Bersama. ADF Magazine.

Bermingham, F., & Tang, F. (2020, November 16). *China's marginal RCEP gains will not offset trade war impact on economy, studies show*. Retrieved from South China Morning Post, US-China Relation: <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3110022/chinas-marginal-rcep-gains-will-not-offset-trade-war-impact>

Tempo. (2024). *Jumlah Pengungsi Di Afrika Naik 3 Kali Lipat Dalam 15 Tahun*. Tempo.com. link: <https://www.tempo.co/internasional/jumlah-pengungsi-di-afrika-naik-3-kali-lipat-dalam-15-tahun-1174038>